

STATISTIK KEUANGAN DAERAH Provinsi Sulawesi Tengah

2017

<https://sulteng.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

STATISTIK KEUANGAN DAERAH

Provinsi Sulawesi Tengah

2017

<https://sulteng.bps.go.id>

STATISTIK KEUANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH 2017

Katalog : 7203003.72
ISSN : 2354-7456
No. Publikasi : 72540.1805
Ukuran Buku : 21 x 29,7 cm
Jumlah Halaman : xii + 50 Halaman

Naskah :
Bidang Statistik Distribusi

Penyunting :
Bidang Statistik Distribusi

Gambar Kulit :
Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik

Diterbitkan Oleh :
©Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tengah

Dicetak Oleh :
Percetakan Rio Palu

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

TIM PENYUSUN

Pengarah:
Faizal Anwar

Penanggungjawab:
G.A. Nasser, SE, M.M

Penyunting/Editor:
Henry Simanjuntak SST, M.Si

Penyusun:
Astuti Dewi Adiningtyas, SST

<https://suning.bps.go.id>

KATA PENGANTAR

Publikasi Statistik Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang disajikan secara series untuk tahun anggaran 2016 - 2017, merupakan kelanjutan dari penerbitan tahun sebelumnya oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Tengah.

Data yang disajikan meliputi realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Sumber utama data berasal dari laporan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan laporan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aset Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Tengah tahun anggaran 2016 - 2017.

Diucapkan terima kasih, kepada semua pihak yang telah membantu sehingga publikasi ini dapat diselesaikan tepat waktu serta penghargaan secara khusus kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang telah membantu dalam penyediaan data.

Semoga publikasi ini dapat bermanfaat bagi para pengguna yang membutuhkannya.

Palu, Desember 2018

**KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



Ir. Faizal Anwar, MT

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Grafik	viii
Daftar Lampiran	ix
I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Ruang Lingkup dan Sumber Data	2
1.3. Konsep dan Definisi	3
II. ULASAN RINGKAS	
2.1. Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	5
2.2. Realisasi Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	6
2.3. Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota	7
2.4. Realisasi Belanja Daerah Kabupaten/Kota	8
Lampiran.....	21

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 1	Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Prov. Sulawesi Tengah Tahun 2016 – 2017 5
Grafik 2	Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Prov. Sulawesi Tengah Tahun 2016 – 2017 6
Grafik 3	Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2017 7
Grafik 4.1	Struktur Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, Banggai dan Morowali Tahun 2017..... 8
Grafik 4.2	Struktur Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso, Donggala dan Toli-toli Tahun 2017 9
Grafik 4.3	Struktur Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Buol, Parigi Moutong dan Tojo Una-una, Tahun 2017 10
Grafik 4.4	Struktur Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi, Banggai Laut, Morowali Utara dan Kota Palu, Tahun 2017..... 12
Grafik 5.	Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Tahun 2017 13
Grafik 6.1	Struktur Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, Banggai dan Morowali Tahun 2017..... 14
Grafik 6.2	Struktur Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Poso, Donggala dan Toli-toli Tahun 2017 15
Grafik 6.3	Struktur Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Buol, Parigi Moutong dan Tojo Una-una, Tahun 2017 16
Grafik 6.4	Struktur Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi, Banggai Laut, Morowali Utara dan Kota Palu, Tahun 2017..... 17

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Tabel 1	Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Prov. Sulawesi Tengah Tahun 2016 – 2017 23
Tabel 2	Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 – 2017 24
Tabel 3	Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 – 2017 25
Tabel 4	Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 – 2017 26
Tabel 5	Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016 – 2017 27
Tabel 6	Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016 – 2017 28
Tabel 7	Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2016 – 2017 29
Tabel 8	Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2016 – 2017 30
Tabel 9	Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso Tahun 2016 – 2017 31
Tabel 10	Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Poso Tahun 2016 – 2017 32
Tabel 11	Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 – 2017 33
Tabel 12	Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 – 2017 34
Tabel 13	Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Toli-toli Tahun 2016 – 2017 35

Tabel 14	Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Toli-toli Tahun 2016 – 2017	36
Tabel 15	Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Buol Tahun 2016 – 2017	37
Tabel 16	Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Buol Tahun 2016 – 2017	38
Tabel 17	Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2016 – 2017	39
Tabel 18	Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2016 – 2017	40
Tabel 19	Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-una Tahun 2016 – 2017	41
Tabel 20	Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-una Tahun 2016 – 2017	42
Tabel 21	Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2016 – 2017	43
Tabel 22	Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2016 – 2017	44
Tabel 23	Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Laut Tahun 2016 – 2017	45
Tabel 24	Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Laut Tahun 2016 – 2017	46
Tabel 25	Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016 – 2017	47
Tabel 26	Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016 – 2017	48
Tabel 27	Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kota Palu Tahun 2016 – 2017	49

Tabel 28	Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kota Palu Tahun 2016 – 2017	50
----------	-----------------------------------------------------------------------------	----

<https://sulteng.bps.go.id>

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perimbangan keuangan sebagaimana diatur dalam Undang - Undang No 12 tahun 2008 dan UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menjadi landasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah saat ini. merupakan subsistem keuangan Negara sebagai konsekuensi dari pembagian tugas antara pemerintah pusat dan daerah. Penyelenggaraan kegiatan oleh pemerintah daerah adalah dalam rangka tugas pembantuan yang didanai oleh APBN. Sedangkan pelaksanaan desentralisasinya didanai APBD. Perimbangan keuangan dimaksudkan untuk menjaga dan mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta antara pemerintah daerah yang satu dengan yang lainnya. Dengan segala kewenangan dan sumber keuangan yang memadai, diharapkan pemerintah daerah lebih leluasa dalam merencanakan pembangunan dan efektif dalam menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat.

Peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah terus diupayakan untuk ditingkatkan sehingga selaras dengan program pembangunan nasional. Hal ini dimaksudkan untuk lebih mewujudkan otonomi daerah yang lebih nyata dan bertanggung jawab. Pembangunan perlu dilaksanakan secara terintegrasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sehingga dapat terwujud keharmonisan dan keseimbangan pembangunan nasional menuju cita – cita bersama yaitu mewujudkan kehidupan masyarakat Indonesia yang adil dan sejahtera.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut di antaranya adalah dengan melakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam bidang keuangan daerah dengan asas transparansi dan akuntabel melalui pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan Kabupaten/Kota yang dikelola dengan efektif dan efisien.

Sesuai dengan ketentuan yang tercantum di dalam pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara bahwa

perhitungan perencanaan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), adalah program kerja yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota dalam tahun anggaran yang bersangkutan sebagaimana telah ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD, yaitu dari Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang dituangkan dalam Peraturan Daerah.

Dalam rangka keperluan analisis untuk pengambilan keputusan dan memenuhi kelengkapan informasi tentang Keuangan Negara, hasil kompilasi data statistik tentang keuangan daerah sangat bermanfaat, antara lain:

1. Sebagai bahan penyusunan neraca ekonomi baik di tingkat daerah maupun nasional seperti pendapatan regional/nasional, tabel input-output, dan neraca arus dana.
2. Memberi gambaran tentang realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah dilakukan baik oleh Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
3. Untuk mengetahui potensi dan sumber dana dari masing-masing daerah.
4. Sebagai informasi bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk menentukan jenis dan besarnya bantuan pembangunan untuk masing-masing daerah di bawahnya.

1.2 Ruang Lingkup dan Sumber Data

Data Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi diperoleh dari Badan Keuangan dan Aset Daerah, Provinsi Sulawesi Tengah, sedangkan untuk Daerah Kabupaten/kota diperoleh dari Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Pemda Kabupaten/Kota (PPKAD).

Dalam penyajiannya rincian realisasi penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota merupakan hasil kompilasi daftar K-1 dan K-2 yang telah disiapkan oleh BPS RI. Periode pencatatan mengacu pada tahun fiskal/anggaran, yakni dari bulan Januari sampai dengan Desember.

1.3 Konsep dan Definisi

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Keuangan Pemerintah Daerah dikelompokkan menjadi tiga bagian yaitu :

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Pendapatan daerah terdiri dari bagian sisa lebih perhitungan anggaran tahun yang lalu, bagian Pendapatan Asli Daerah (PAD), bagian Dana Perimbangan berupa bagi hasil pajak/ bukan pajak, dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2. Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah terdiri atas belanja tak langsung dan belanja langsung. Belanja tak langsung berasal dari belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa, belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa, serta belanja tidak terduga. Sedangkan belanja langsung berasal dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal.

Belanja Tak Langsung

Belanja tak langsung adalah bagian belanja yang dianggarkan yang tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program pemerintah.

Belanja Langsung

Belanja langsung adalah bagian belanja yang dianggarkan yang terkait langsung dengan pelaksanaan program pemerintah.

II. ULASAN RINGKAS

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan sumber keuangan Pemerintah Daerah untuk menjalankan fungsi pemerintahan sebagai regulator dalam pelayanan masyarakat. Keberhasilan Pemerintah Daerah dalam memajukan suatu daerah sangat tergantung kebijakan pengalokasian dana APBD untuk pelaksanaan program-program pembangunan. Sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas, APBD dipertanggungjawabkan oleh Pemerintah Daerah setiap tahunnya di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

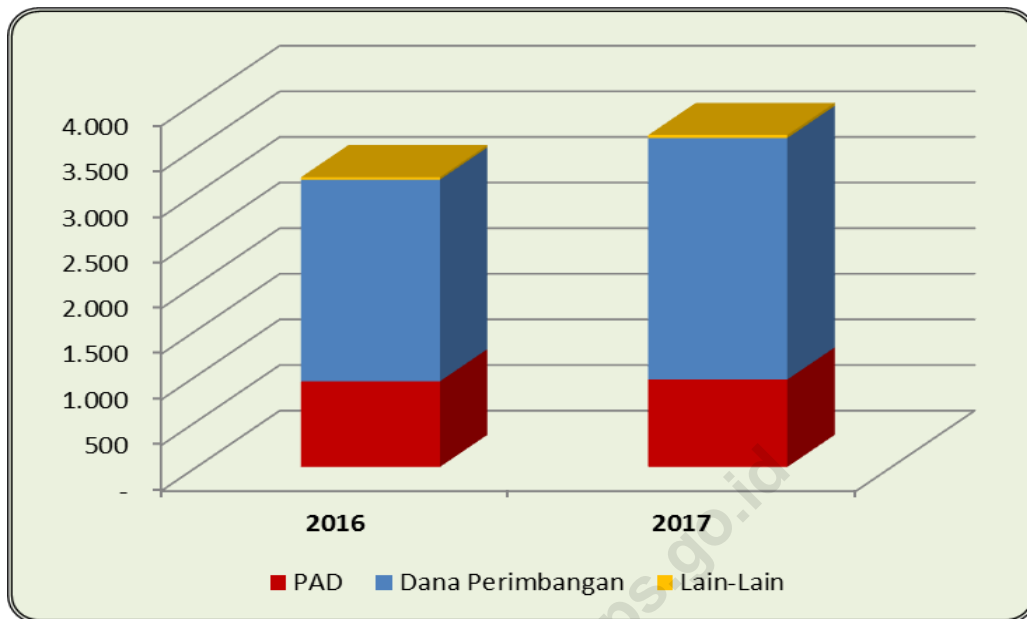
Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen Pendapatan Daerah sebagai tolok ukur kinerja Pemerintah Daerah dalam mengelola dan mengoptimalkan potensi daerah yang dimiliki. Selanjutnya bagian Dana Perimbangan sebagai komponen terbesar Pendapatan Daerah menunjukkan seberapa besar ketergantungan daerah tersebut terhadap pemerintah pusat dalam memenuhi kebutuhan belanja daerahnya. Belanja Daerah terdiri dari bagian Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Dari komposisi Belanja Daerah, dapat dilihat program prioritas Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pembangunan dan fungsi pelayanan kepada masyarakat.

2.1. Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Selama tahun 2017, realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tercatat sejumlah 3.638,34 miliar rupiah atau meningkat 14,57 persen dari tahun 2016. Pesatnya pertumbuhan tersebut disebabkan oleh tingginya peningkatan realisasi bagian Pendapatan lainnya dan Dana Perimbangan masing-masing sebesar 26,52 persen dan 19,75 persen. Pada periode yang sama Pendapatan Asli Daerah (PAD) tumbuh sebesar 2,04 persen terutama berasal dari Retribusi daerah yakni sebesar 25,95 persen diikuti oleh Pendapatan Asli Daerah Lainnya yang sah dengan peningkatan sebesar 6,30 persen.

Kontribusi terbesar pendapatan daerah berasal dari dana perimbangan yakni sebesar 72,76 persen dari keseluruhan Anggaran Pendapatan Daerah, diikuti oleh pendapatan asli daerah dan pendapatan lainnya yang sah masing-masing sebesar 26,34 persen dan 0,90 persen.

Grafik 1.
Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2016-2017 (miliar rupiah)

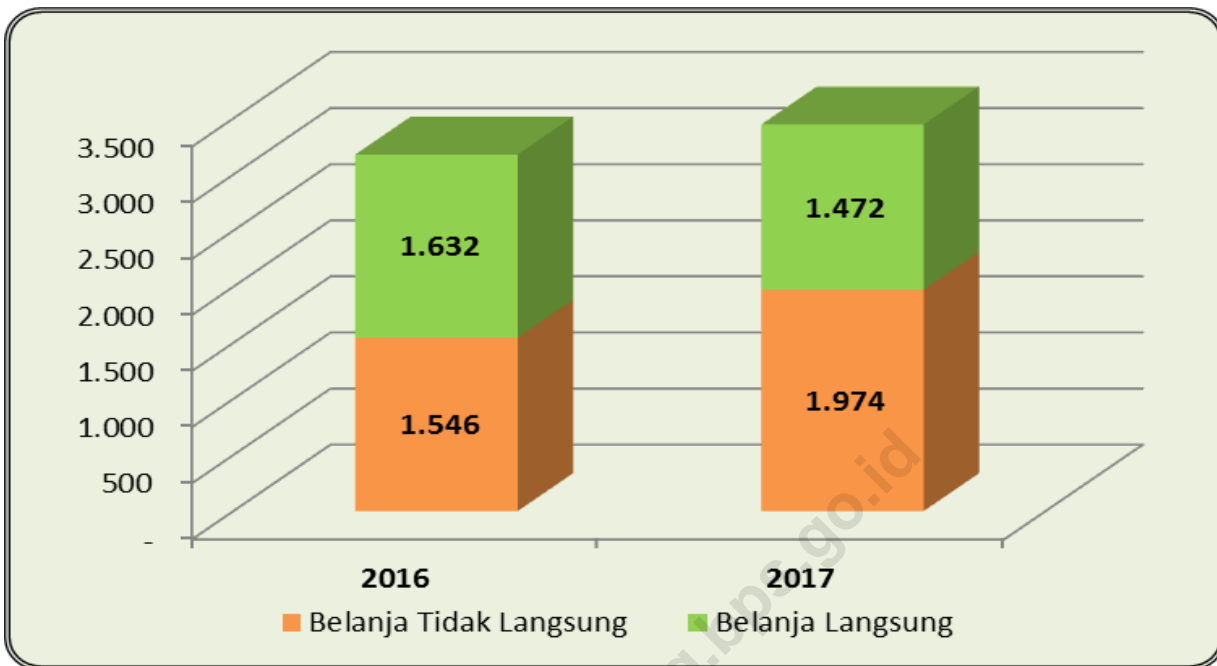


Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

2.2. Realisasi Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Pada tahun 2017, total realisasi Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mencapai sejumlah 3.445,78 miliar rupiah, meningkat 8,42 persen dibandingkan realisasi belanja tahun sebelumnya yang mencapai 3.178,12 miliar rupiah. Sebesar 57,27 persen realisasi belanja tersebut terserap pada Belanja Tidak Langsung atau setara dengan 1.973,54 miliar rupiah, sedangkan sebesar 42,73 persen sisanya terserap pada Belanja Langsung yaitu sejumlah 1.472,24 miliar rupiah. Porsi Belanja Pegawai keseluruhan baik yang berasal dari Belanja Langsung maupun Belanja Tidak Langsung terhadap total Belanja Daerah mencapai angka yang cukup besar yakni 34,13 persen atau sejumlah 1.175,92 miliar rupiah, sedangkan alokasi untuk Belanja Modal dari total nilai Belanja Daerah hanya sebesar 13,50 persen atau sejumlah 465,12 miliar rupiah mengalami penurunan dari sebelumnya yang mencapai 15,86 persen atau sebesar 503,97 miliar rupiah.

Grafik 2.
Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun Anggaran 2016-2017 (miliar rupiah)



Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

2.3. Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota

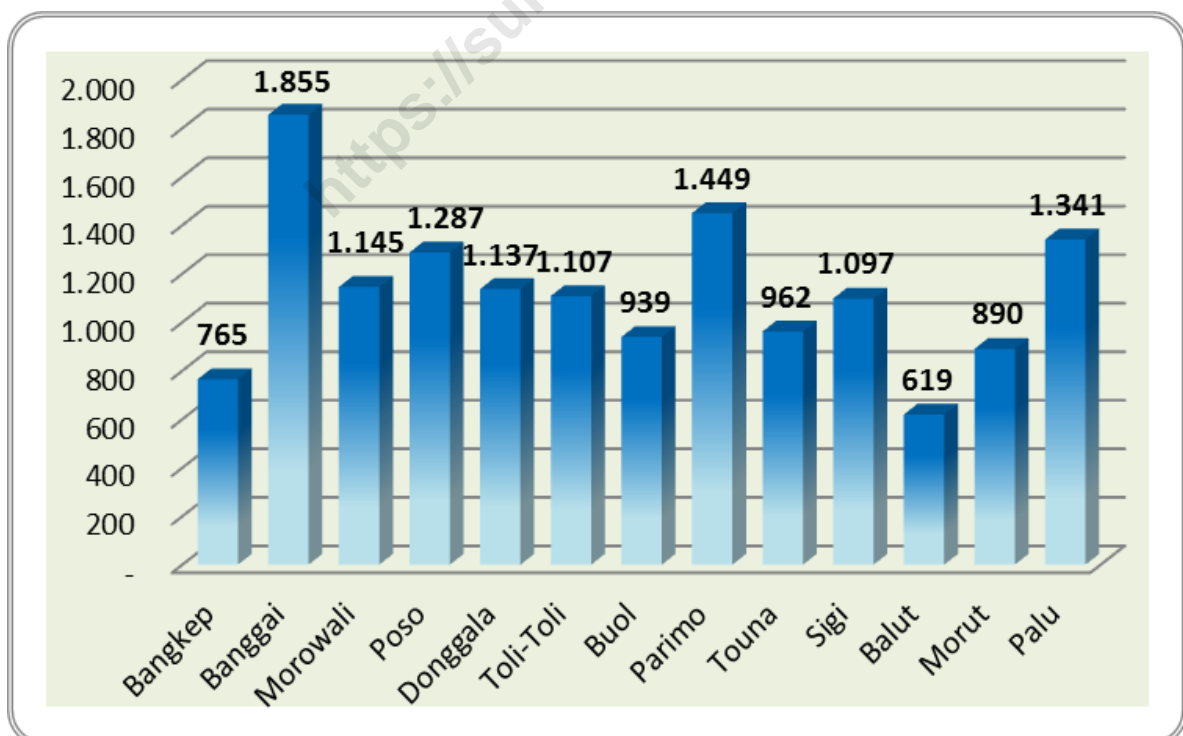
Secara umum realisasi Pendapatan Daerah kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah tahun anggaran 2017 berfluktuasi jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Peningkatan realisasi Pendapatan Daerah terjadi di 7 (tujuh) kabupaten, sementara 6 (enam) kabupaten/kota lainnya mengalami penurunan realisasi pendapatan daerah. Peningkatan realisasi pendapatan daerah tertinggi terjadi di Kabupaten Morowali yang mencapai 21,03 persen diikuti Kabupaten Toli-Toli yakni sebesar 19,72 persen, dan selanjutnya Kabupaten Banggai Laut sebesar 12,64 persen. Kabupaten yang mengalami penurunan realisasi pendapatan daerah tertinggi adalah Kabupaten Donggala sebesar -10,29 persen, diikuti Kabupaten Tojo Una-Una sebesar -9,50 persen, selanjutnya Kabupaten Sigi sebesar -9,49 persen.

Peningkatan pendapatan asli daerah merupakan salah satu wujud nyata keberhasilan pemerintah daerah. Pada tahun 2017, secara umum seluruh Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah mengalami peningkatan PAD jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Peningkatan PAD tertinggi terdapat di

Kabupaten Morowali sebesar 161,79 persen disusul Kabupaten Sigi sebesar 134,25 persen dan Kabupaten Banggai Kepulauan sebesar 116,29 persen. Sedangkan kenaikan PAD terkecil terjadi di Kota Palu yaitu sebesar 1,72 persen yakni dari 279,58 miliar rupiah pada tahun 2016 menjadi 284,38 miliar rupiah pada tahun 2017.

Proporsi PAD terhadap total Pendapatan Daerah merupakan salah satu indikasi kemandirian suatu daerah otonomi. Apabila dirinci dari proporsi PAD terhadap total Pendapatan Daerah, maka pada tahun 2017 proporsi tertinggi dicapai oleh Kota Palu sebesar 21,21 persen, diikuti oleh Kabupaten Morowali di urutan kedua sebesar 16,65 persen, dan Kabupaten Parigi Moutong pada urutan ketiga dengan persentase sebesar 10,62 persen. Kabupaten dengan proporsi PAD terendah terhadap total pendapatan daerah adalah Kabupaten Banggai Laut dengan persentase sebesar 4,90 persen.

Grafik 3.
Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Tahun 2017 (miliar rupiah)

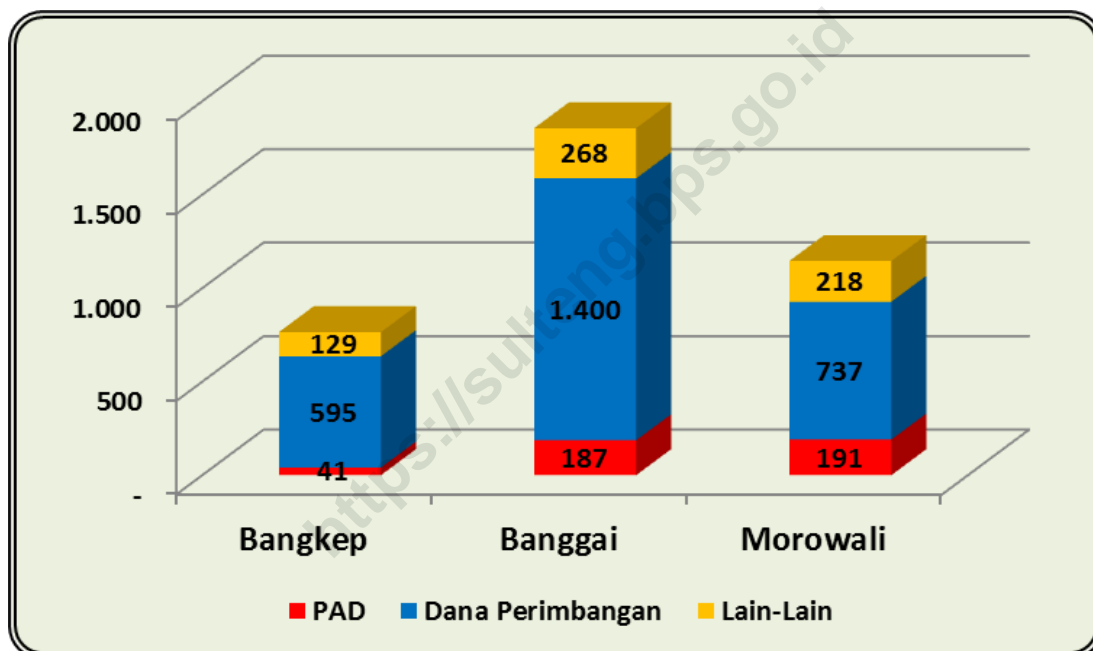


Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Pemda Kab./Kota

Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2017 mencapai 764,65 miliar rupiah, naik sebesar 8,47 persen dibandingkan dengan tahun 2016. Bila dicermati struktur pembentuk Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan persentase terbesar berasal dari Dana Perimbangan yaitu sebesar 77,82 persen. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 16,84 persen, sedangkan Pendapatan Asli Daerah hanya sebesar 5,34 persen dari total pendapatan daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Grafik 4.1.

Struktur Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, Banggai dan Morowali, Tahun 2017 (miliar rupiah)



Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

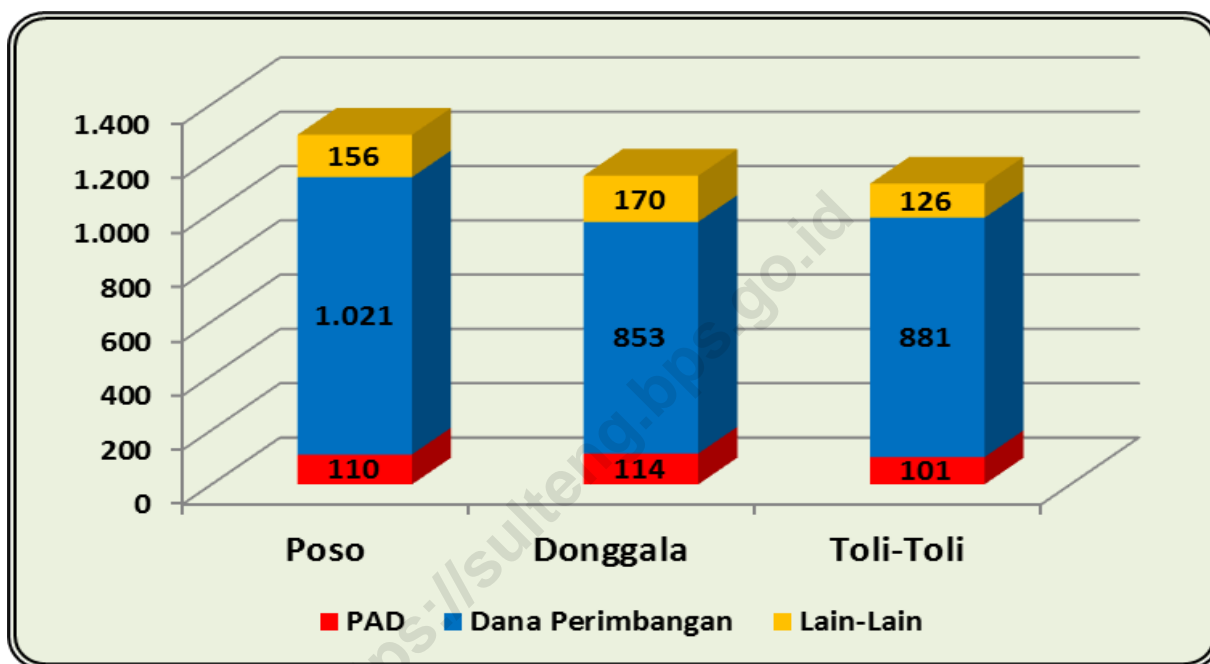
Kabupaten Banggai tahun 2017 mencatat peningkatan realisasi Pendapatan Daerah sebesar 10,38 persen yaitu dari 1.680,58 miliar rupiah tahun 2016 menjadi 1.855,04 miliar rupiah pada tahun 2017. Struktur pendapatan daerah Kabupaten Banggai pada tahun 2017 tersusun atas 75,48 persen berasal dari dana perimbangan, 14,46 persen lain-lain pendapatan daerah yang sah, dan 10,06 persen Pendapatan Asli Daerah.

Jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2016, Kabupaten Morowali pada tahun 2017 merupakan kabupaten yang mengalami kenaikan pendapatan daerah tertinggi di Provinsi Sulawesi Tengah yaitu sebesar 21,03 persen. Struktur

pendapatan daerah Kabupaten Morowali, didominasi oleh dana perimbangan sebesar 64,35 persen, selanjutnya Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 19,01 persen, dan sisanya sebesar 16,65 persen berasal dari Pendapatan Asli Daerah.

Grafik 4.2.

Struktur Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso, Donggala dan Tolitoli Tahun 2017 (miliar rupiah)



Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Kabupaten Poso pada tahun 2017 mengalami penurunan realisasi pendapatan daerah sebesar -0,07 persen yaitu dari 1.288,34 miliar rupiah pada tahun 2016 menjadi 1.287,41 miliar rupiah pada tahun 2017. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Poso pada tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 50,87 persen, namun kenaikan tersebut hanya memberikan andil sebesar 8,57 persen terhadap pendapatan daerah Kabupaten Poso. Andil terbesar pendapatan daerah Kabupaten Poso berasal dari dana perimbangan yaitu sebesar 79,29 persen, dan sisanya sebesar 12,14 persen berasal dari Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

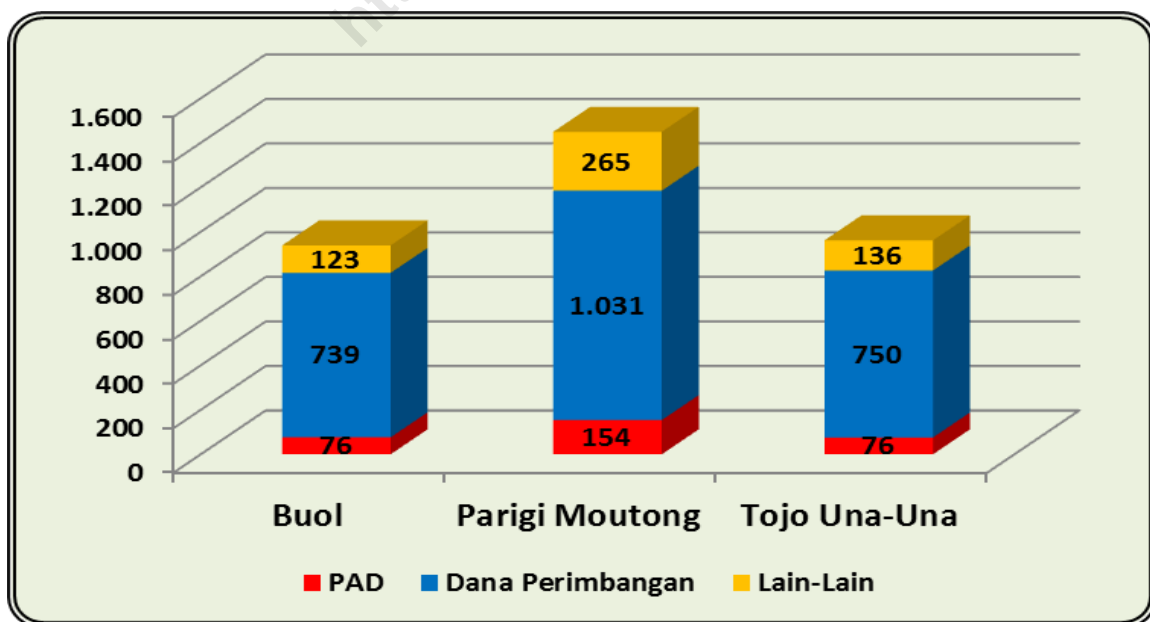
Pada tahun anggaran 2017 Kabupaten Donggala mengalami penurunan realisasi pendapatan daerah tertinggi di Sulawesi Tengah sebesar -10,29 persen, yaitu dari 1.266,92 miliar rupiah pada tahun 2016 menjadi 1.136,59 miliar rupiah pada tahun 2017. Penurunan tersebut disebabkan oleh turunnya pendapatan pada

dana perimbangan dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah masing-masing sebesar -15,44 persen dan -9,29 persen. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Donggala pada tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 60,40 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Struktur pendapatan daerah di Kabupaten Donggala didominasi oleh dana perimbangan sebesar 75,06 persen, diikuti Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 14,94 persen, dan pendapatan asli daerah sebesar 10,01 persen.

Kabupaten Toli-toli pada tahun 2017 mengalami peningkatan realisasi pendapatan daerah sebesar 19,72 persen, yaitu dari 924,98 miliar rupiah pada tahun 2016 menjadi 1.107,43 miliar rupiah pada tahun 2017. Peningkatan ini disebabkan oleh naiknya Pendapatan Asli Daerah sebesar 57,98 persen, Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 25,47 persen, dan peningkatan dana perimbangan sebesar 15,77 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kontribusi pendapatan daerah kabupaten Toli-toli terbesar berasal dari Dana Perimbangan sebesar 79,59 persen, diikuti Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 11,34 persen, dan Pendapatan asli daerah sebesar 9,08 persen.

Grafik 4.3.

Struktur Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Buol, Parigi Moutong dan Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2017 (miliar rupiah)



Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

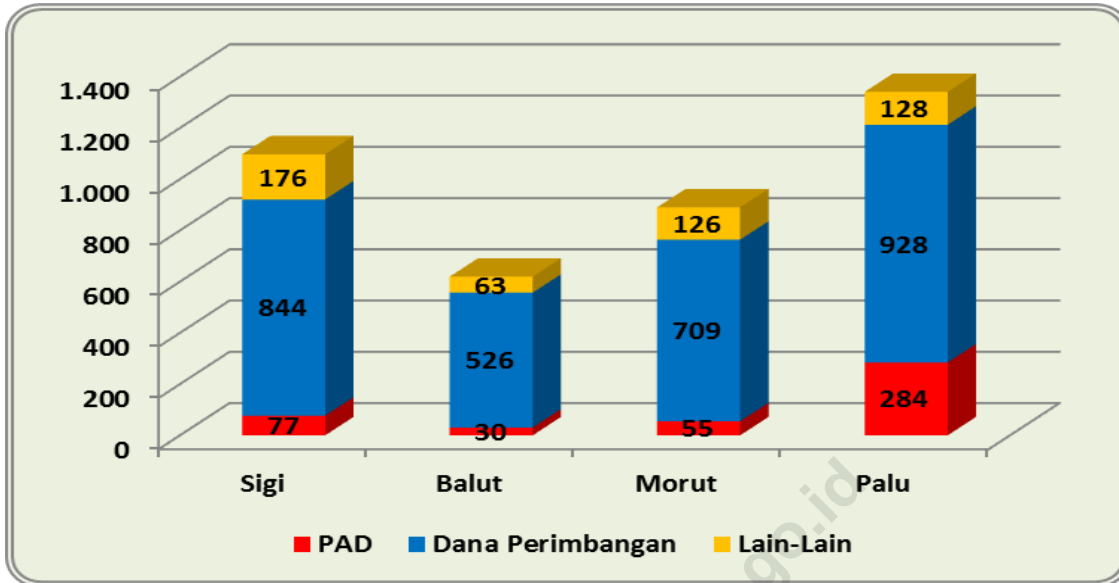
Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Buol tahun anggaran 2017 sebesar 938,75 miliar rupiah, meningkat 4,07 persen dari tahun sebelumnya sebesar 902,03 miliar rupiah. Berdasarkan sumber pendapatan daerah, dana perimbangan memberikan andil terbesar terhadap pendapatan daerah Kabupaten Buol yaitu sebesar 78,73 persen, selanjutnya Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 13,15 persen, dan pendapatan asli daerah sebesar 8,12 persen.

Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong pada tahun 2017 mencatat realisasi pendapatan daerah sebesar 1.449,46 miliar rupiah atau turun sebesar -1,35 persen dibandingkan tahun 2016 yang tercatat sebesar 1.469,28 miliar rupiah. Penurunan ini disebabkan oleh turunnya pendapatan pada dana perimbangan sebesar -8,17 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Jika dilihat struktur pendapatan daerah Kabupaten Parigi Moutong masih didominasi oleh dana perimbangan yaitu sebesar 71,13 persen, diikuti Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 18,26 persen, dan Pendapatan asli daerah sebesar 10,62 persen.

Realisasi pendapatan Kabupaten Tojo Una-Una pada tahun 2017 sebesar 961,58 miliar rupiah atau turun -9,50 persen dibandingkan tahun 2016 sebesar 1.062,57 persen. Penurunan ini disebabkan oleh turunnya dana perimbangan yang semula 899,34 miliar rupiah pada tahun 2016 turun -16,57 persen menjadi 750,36 miliar rupiah pada tahun 2017. Struktur Pendapatan Daerah Kabupaten Tojo Una-una masih sangat didominasi Dana Perimbangan yaitu sebesar 78,03 persen, sedangkan bagian Pendapatan Asli Daerah dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah masing-masing sebesar 7,87 persen dan 14,10 persen.

Realisasi pendapatan Kabupaten Sigi pada tahun 2017 sebesar 1.097,23 miliar rupiah, jumlah ini turun sebesar -9,49 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dilihat dari struktur pembentuk pendapatan daerah Kabupaten Sigi, Dana Perimbangan mendominasi dengan andil sebesar 76,94 persen, diikuti oleh bagian Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 16,08 persen, sedangkan Pendapatan Asli Daerah meskipun mengalami kenaikan sebesar 134,25 persen dari tahun sebelumnya, hanya memberikan kontribusi sebesar 6,98 persen terhadap total realisasi pendapatan daerah Kabupaten Sigi

Grafik 4.4.
Struktur Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi, Banggai Laut,
Morowali Utara, dan Kota Palu Tahun 2017 (miliar rupiah)



Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab./Kota

Sebagai kabupaten yang baru terbentuk Kabupaten Banggai Laut dan Kabupaten Morowali Utara memiliki Pendapatan Daerah yang cukup kecil. Kabupaten Banggai Laut memiliki Pendapatan Daerah sebesar 619,31 miliar rupiah dimana 85,00 persen diantaranya berasal dari Dana Perimbangan sedangkan Lain-Lain Pendapatan yang Sah dan Pendapatan Asli Daerah masing-masing sebesar 10,10 persen dan 4,90 persen. Keadaan yang hampir sama terjadi di Kabupaten Morowali Utara dimana dari 889,95 miliar rupiah Pendapatan daerah sebesar 79,68 persen berasal dari Dana Perimbangan sisanya 14,18 persen adalah Lain-lain Pendapatan yang sah dan Pendapatan Asli Daerah sebesar 6,14 persen.

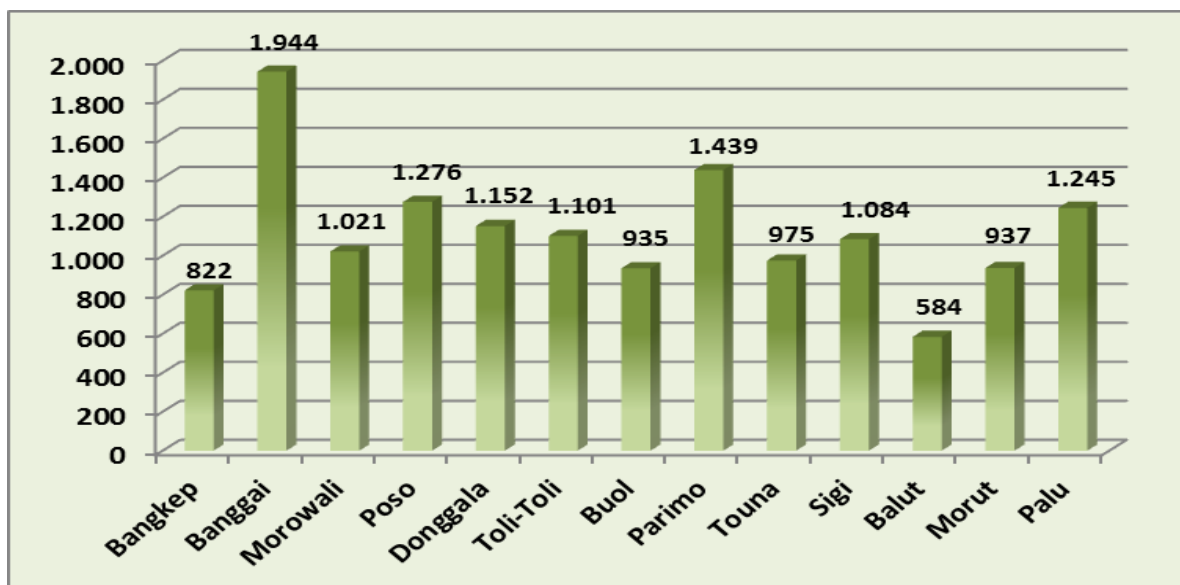
Pendapatan Daerah Kota Palu tahun anggaran 2017 sebesar 1.340,65 miliar rupiah atau mengalami penurunan - 3,70 persen dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 1.392,21 miliar rupiah. Penurunan ini disebabkan oleh turunnya komponen dana perimbangan sebesar -10,37 persen, sedangkan pendapatan asli daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah menunjukkan pertumbuhan positif masing-masing sebesar 1,72 persen dan 66,13 persen. Pendapatan asli daerah yang digunakan sebagai tolok ukur kinerja daerah memiliki andil sebesar 21,21 persen terhadap total pendapatan daerah Kota Palu,

hal ini menjadikan Kota Palu sebagai satu-satunya kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah yang memiliki andil PAD diatas 20 persen. Selanjutnya dana perimbangan dan Lain – lain pendapatan daerah yang sah memberikan andil terhadap total pendapatan daerah Kota Palu masing-masing sebesar 69,22 persen dan 9,57 persen.

2.4. Realisasi Belanja Daerah Kabupaten/Kota

Secara umum realisasi Belanja Daerah kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah tahun anggaran 2017 berfluktuasi jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Peningkatan realisasi Belanja Daerah terjadi di 6 (enam) kabupaten, sementara 7 (tujuh) kabupaten/kota lainnya mengalami penurunan realisasi belanja daerah. Peningkatan realisasi belanja daerah tertinggi terjadi di Kabupaten Banggai Kepulauan yang mencapai 17,95 persen diikuti Kabupaten Morowali yakni sebesar 16,48 persen, dan selanjutnya Kabupaten Toli-toli sebesar 16,29 persen. Kabupaten yang mengalami penurunan realisasi belanja daerah tertinggi adalah Kabupaten Sigi sebesar -10,64 persen, diikuti Kabupaten Donggala sebesar -10,01 persen, selanjutnya Kota Palu sebesar -9,84 persen.

Gambar. 5
Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Tahun Anggaran 2017 (miliar rupiah)



Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Pemda Kab./Kota

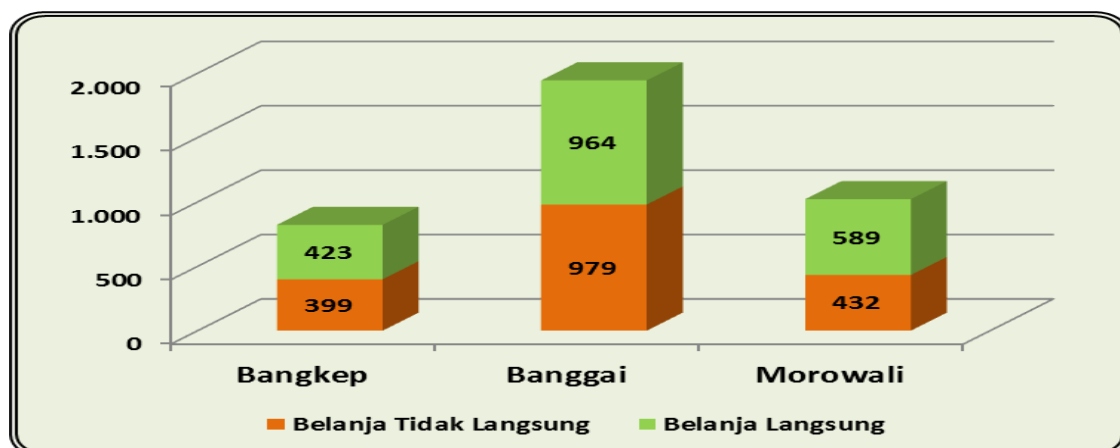
Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2017 mencapai 821,98 miliar rupiah naik 17,95 persen dari tahun sebelumnya sebesar 696,87 miliar rupiah. Komposisi belanja daerah Kabupaten Banggai Kepulauan terdiri dari 48,55 persen Belanja Tidak Langsung atau setara dengan 399,08 miliar rupiah dan 51,45 persen Belanja Langsung atau setara dengan 422,90 miliar rupiah. Komponen Belanja Langsung didominasi oleh Belanja Modal yang mencapai 56,71 persen, kemudian diikuti oleh Belanja Barang dan Jasa sebesar 34,38 persen dan 8,91 persen sisanya dipergunakan untuk porsi Belanja Pegawai.

Kabupaten Banggai tahun 2017 mencatat realisasi Belanja Daerah sebesar 1.943,50 miliar rupiah, naik sebesar 9,06 persen dibandingkan periode sebelumnya sebesar 1.782,02 miliar rupiah. Sebesar 50,40 persen direalisasikan untuk Belanja Tidak Langsung sedangkan 49,60 persen untuk Belanja Langsung. Dari 964,02 miliar rupiah Belanja Langsung, sebesar 50,94 persen digunakan untuk Belanja Modal sedangkan Belanja Barang/Jasa dan Belanja Pegawai masing-masing sebesar 43,32 persen dan 5,74 persen.

Pada tahun 2017 Belanja Daerah Kabupaten Morowali yang terealisasi sebesar 1.021,21 miliar rupiah, naik 16,48 persen dari tahun sebelumnya. Sebesar 42,33 persen dari total belanja digunakan untuk Belanja Tidak Langsung dan 57,67 persen untuk Belanja Langsung. Struktur Belanja Langsung terdiri dari 55,74 persen Belanja Modal, diikuti 34,11 persen Belanja Barang/Jasa, dan sisanya 10,15 persen digunakan untuk Belanja Pegawai.

Gambar. 6.1.

Struktur Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, Banggai dan Morowali Tahun 2017 (miliar rupiah)



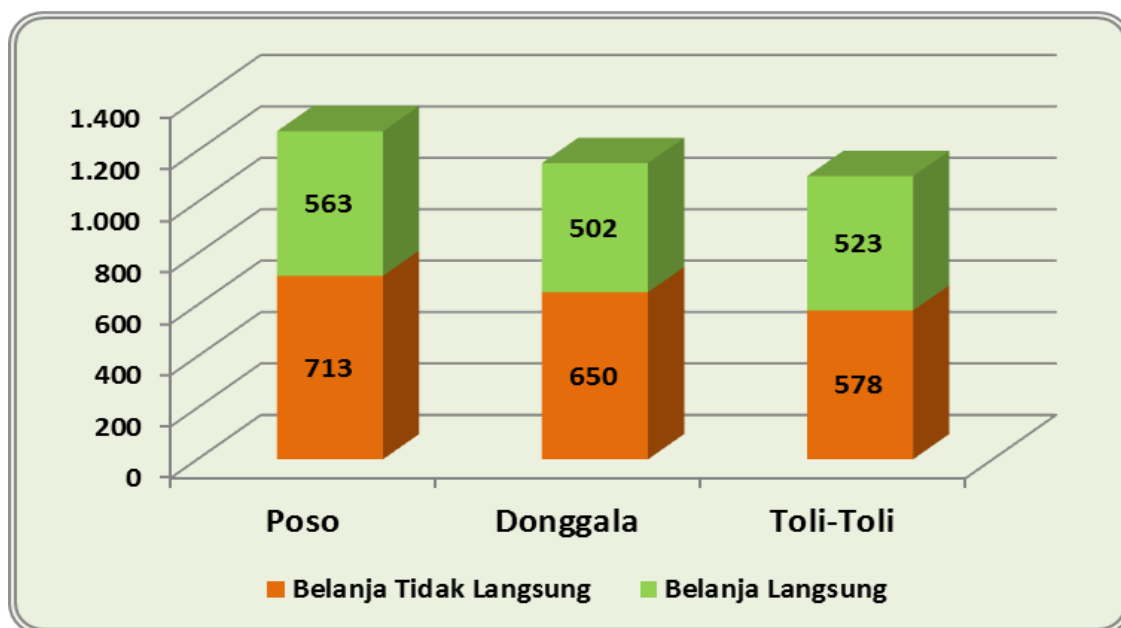
Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Kabupaten Poso tahun 2017 menghabiskan anggaran sebesar 1.275,78 miliar rupiah untuk Belanja Daerah atau mengalami penurunan sebesar -2,21 persen dibandingkan belanja tahun sebelumnya. Porsi terbesar dialokasikan untuk Belanja Tidak Langsung yaitu sebesar 55,90 persen, sedangkan Belanja Langsung mendapat porsi sebesar 44,10 persen. Belanja Langsung yang berkaitan dengan pelaksanaan program-program pemerintah sebesar 562,59 miliar rupiah digunakan dengan proporsi untuk Belanja Pegawai sebesar 7,02 persen, Belanja Barang dan Jasa sebesar 46,43 persen dan Belanja Modal sebesar 46,55 persen.

Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Donggala Tahun 2017 sebesar 1.152,06 miliar rupiah, turun -10,01 persen dari tahun sebelumnya yang mencapai 1.280,22 miliar rupiah. Porsi belanja Kabupaten Donggala sebesar 56,40 persen dialokasikan untuk Belanja Tidak Langsung dan sebesar 43,60 persen dialokasikan untuk Belanja Langsung. Dari total belanja langsung sebesar 502,28 miliar rupiah sebesar 52,47 persen digunakan untuk Belanja Barang/Jasa, selanjutnya sebesar 33,18 persen untuk Belanja Modal, dan sisanya 14,35 persen untuk belanja pegawai.

Gambar. 6.2.

Struktur Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Poso, Donggala dan Toli-Toli Tahun 2017 (miliar rupiah)

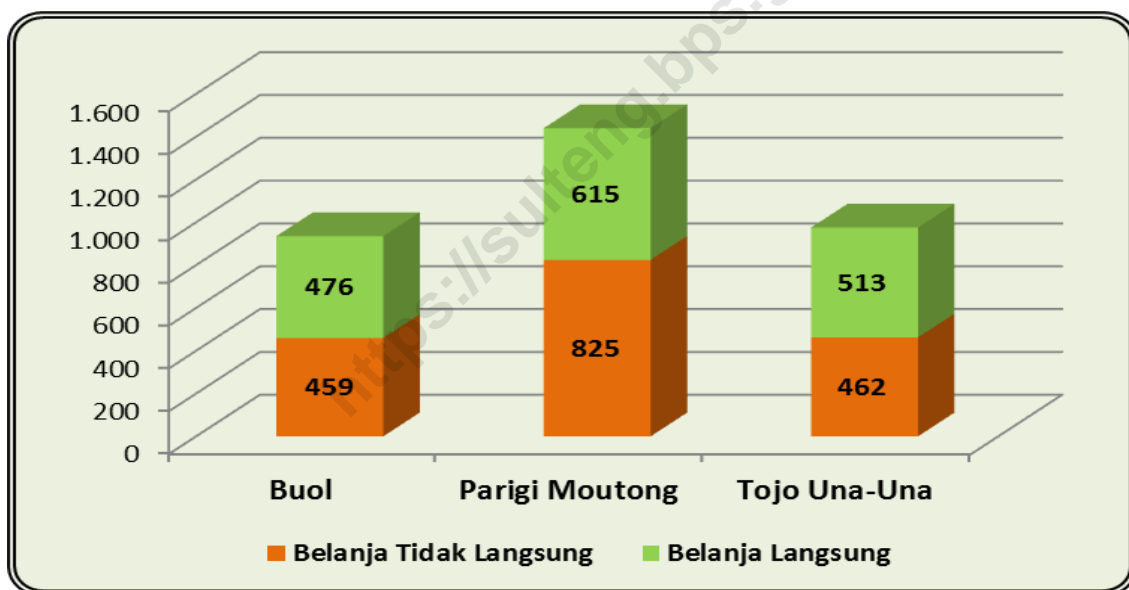


Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Total Belanja Daerah Kabupaten Toli-toli Tahun 2017 tercatat sebesar 1.100,85 miliar rupiah naik 16,29 persen dari realisasi belanja tahun sebelumnya sebesar 946,61 miliar rupiah. Dari total belanja tersebut Kabupaten Toli-toli mengalokasikan sebesar 52,52 persen untuk belanja tidak langsung dan sisanya sebesar 47,48 persen untuk belanja langsung. Sebesar 50,89 persen dari total 522,64 miliar rupiah Belanja Langsung direalisasikan untuk Belanja Modal, sedangkan Belanja Pegawai dan Belanja Barang masing-masing sebesar 8,02 persen dan 41,09 persen.

Gambar. 6.3.

Struktur Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Buol, Parigi Moutong dan Tojo Una-Una Tahun 2017 (miliar rupiah)



Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

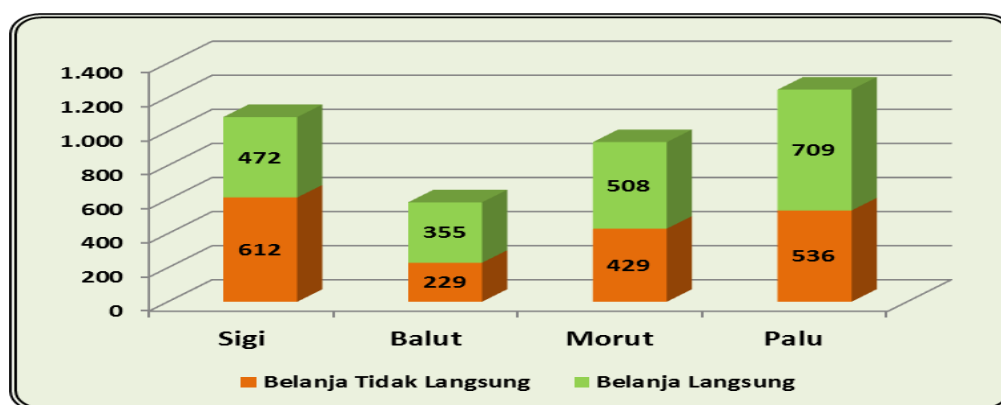
Pada tahun 2016 Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Buol mencapai 953,37 miliar rupiah turun menjadi 935,35 miliar rupiah dengan penurunan sebesar -1,89 persen pada tahun 2017. Realisasi belanja tersebut dimanfaatkan untuk porsi Belanja Langsung sebesar 50,91 persen dan Belanja Tidak Langsung sebesar 49,09 persen. Sebesar 476,21 miliar rupiah total Belanja Langsung digunakan untuk Belanja Modal sebesar 49,75 persen, untuk Belanja Barang dan Jasa sebesar 38,78 persen, dan untuk Belanja Pegawai sebesar 11,47 persen.

Realisasi Belanja Kabupaten Parigi Moutong tahun anggaran 2017 sebesar 1.439,42 miliar rupiah, turun -1,50 persen dari tahun 2016 sebesar 1.461,27 miliar rupiah. Belanja Tidak Langsung terealisasi sebesar 824,63 miliar rupiah naik 7,35 persen dari tahun sebelumnya, sedangkan Belanja Langsung sebesar 614,79 miliar rupiah turun -11,30 persen dari tahun sebelumnya. Alokasi dari total Belanja Langsung sebesar 50,41 persen digunakan untuk Belanja Barang dan Jasa, sedangkan Belanja Pegawai dan Belanja Modal masing-masing mendapat porsi sebesar 11,61 persen dan 37,98 persen.

Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2017 mencapai 975,36 miliar rupiah, turun -7,97 persen dari tahun sebelumnya sebesar 1.059,84 miliar rupiah. Pada tahun 2017 Belanja Tidak Langsung menunjukkan peningkatan realisasi sebesar 3,81 persen dari tahun sebelumnya, sedangkan bagian Belanja Langsung mengalami penurunan sebesar 16,50 persen. Sebesar 52,64 persen total Belanja Daerah dimanfaatkan untuk Belanja Langsung dengan distribusi Belanja Pegawai sebesar 15,01 persen, Belanja Barang sebesar 43,52 persen dan Belanja Modal sebesar 41,47 persen.

Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Sigi tahun 2017 terealisasi sejumlah 1.084,23 miliar rupiah turun sebesar -10,64 persen. Belanja Tidak Langsung tercatat sejumlah 612,24 miliar rupiah dan Belanja Langsung sejumlah 471,99 miliar rupiah. Total Belanja Langsung dialokasikan untuk Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal masing-masing sebesar 1,38 persen, 55,22 persen dan 43,40 persen.

Gambar. 6.4.
Struktur Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi, Banggai Laut, Morowali Utara dan Kota Palu Tahun 2017 (miliar rupiah)



Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab./Kota

Anggaran belanja daerah Kabupaten Banggai Laut pada tahun 2017 tercatat sebesar 583,63 miliar rupiah naik 11,56 persen dari tahun sebelumnya sebesar 523,15 miliar rupiah. Sebesar 20,07 persen dari total belanja daerah digunakan untuk Belanja Tidak Langsung sedangkan 60,79 persen digunakan untuk belanja langsung. Dari 354,79 miliar rupiah dana yang dialokasikan untuk Belanja Langsung, sebesar 12,31 persen digunakan untuk Belanja Pegawai, 32,16 persen untuk belanja Barang/Jasa, dan sisanya 55,54 persen untuk Belanja Modal.

Kabupaten Morowali Utara merealisasikan anggaran Belanja sebesar 937,08 miliar rupiah pada tahun 2017. Total anggaran untuk Belanja Tidak Langsung sebesar 429,00 miliar rupiah atau sebesar 11,61 persen dari total belanja daerah, sedangkan Belanja Langsung sebesar 508,07 miliar rupiah atau 54,22 persen dari belanja daerah. Adapun Belanja Langsung yang digunakan untuk belanja pegawai sebesar 47,00 miliar rupiah atau sebesar 9,25 persen. Sedangkan yang digunakan untuk Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal masing-masing sebesar 42,83 persen dan 47,92 persen.

Realisasikan Belanja Daerah Kota Palu tahun 2017 sejumlah 1.245,19 miliar rupiah, jumlah ini mengalami penurunan -9,84 persen dari tahun 2016 yang hanya sebesar 1.381,08 miliar rupiah. Penurunan realisasi belanja tersebut disebabkan oleh turunnya Belanja Tidak Langsung sebesar -20,24 persen, sementara Belanja Langsung naik sebesar 0,02 persen dari tahun sebelumnya. Porsi Belanja Langsung Tahun 2017 mencapai 709,32 miliar rupiah atau 56,97 persen dari total Belanja Daerah, sedangkan 43,03 persen sisanya direalisasikan untuk Belanja Tidak Langsung. Porsi terbesar dari Belanja Langsung adalah untuk Belanja Barang dan Jasa yang mencapai 401,31 miliar rupiah atau 56,58 persen. Sementara itu Belanja Pegawai dan Belanja Modal masing-masing terealisasi sebesar 56,91 miliar rupiah (8,02 persen) dan 251,10 miliar rupiah (35,40 persen).

LAMPIRAN

<https://sulteng.br.id>

Tabel 1. Realisasi Penerimaan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2016 – 2017 (ribu rupiah)

JENIS PENDAPATAN	2016	2017
(1)	(3)	(4)
A. Pendapatan Daerah	3 175 693 867	3 638 342 669
1. Pendapatan Asli Daerah	939 092 717	958 212 002
1.1. Pajak Daerah	776 340 401	790 439 058
1.2. Retribusi Daerah	7 047 545	8 876 138
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	23 605 753	18 478 974
1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	132 099 018	140 417 832
2. Dana Perimbangan	2 210 604 820	2 647 241 314
2.1. Dana Bagi Hasil Pajak	64 668 487	58 864 256
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	37 389 645	65 973 555
2.3. Dana Alokasi Umum	1 272 925 036	1 546 247 611
2.4. Dana Alokasi Khusus	835 621 352	976 155 893
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	25 996 330	32 889 353
B. Pembiayaan Daerah	72 936 672	33 051 620
JUMLAH	3 248 630 539	3 671 394 289

Tabel 2. Realisasi Pengeluaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2016 – 2017 (ribu rupiah)

JENIS PENGELUARAN	2016	2017
(1)	(3)	(4)
A. Belanja Daerah	3 178 117 505	3 445 777 071
1. Belanja Tidak Langsung	1 545 657 444	1 973 535 890
1.1. Belanja Pegawai	562 081 903	1 056 063 909
1.2. Belanja Bunga	-	-
1.3. Belanja Subsidi	603 336 224	500 953 710
1.4. Belanja Hibah	1 684 500	1 073 800
1.5. Belanja Bantuan Sosial	1 684 500	1 073 800
1.6. Belanja Bagi Hasil	365 381 747	409 671 450
1.7. Belanja Bantuan Keuangan	13 171 319	5 639 009
1.8. Belanja Tidak Terduga	1 750	134 013
2. Belanja Langsung	1 632 460 062	1 472 241 181
2.1. Belanja Pegawai	120 274 653	119 857 964
2.2. Belanja Barang dan Jasa	1 008 212 400	887 262 609
2.3. Belanja Modal	503 973 010	465 120 609
B. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan	70 512 733	225 617 217
JUMLAH	3 248 630 238	3 671 394 289

Tabel 3. Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2016 – 2017 (ribu rupiah)

JENIS PENDAPATAN	2016	2017
(1)	(3)	(4)
A. Pendapatan Daerah	704 938 365	764 650 292
1. Pendapatan Asli Daerah	18 882 843	40 841 503
1.1. Pajak Daerah	4 468 414	5 679 624
1.2. Retribusi Daerah	2 727 336	5 131 212
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	647 152	735 421
1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	11 039 941	29 295 246
2. Dana Perimbangan	575 069 247	595 065 929
2.1. Dana Bagi Hasil Pajak	15 487 826	19 386 830
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	-	-
2.3. Dana Alokasi Umum	455 778 935	453 262 455
2.4. Dana Alokasi Khusus	103 802 486	122 416 644
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	110 986 275	128 742 860
B. Pembiayaan Daerah	102 602 496	106 238 755
JUMLAH	807 540 861	870 889 047

Tabel 4. Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2016 – 2017 (ribu rupiah)

JENIS PENGELUARAN	2016	2017
(1)	(3)	(4)
A. Belanja Daerah	696 869 397	821 976 102
1. Belanja Tidak Langsung	416 330 868	399 077 267
1.1. Belanja Pegawai	248 472 693	231 969 079
1.2. Belanja Bunga	-	-
1.3. Belanja Subsidi	-	-
1.4. Belanja Hibah	38 617 600	1 840 000
1.5. Belanja Bantuan Sosial	303 000	360 000
1.6. Belanja Bagi Hasil	-	1 794 803
1.7. Belanja Bantuan Keuangan	128 708 049	161 613 385
1.8. Belanja Tidak Terduga	229 526	1 500 000
2. Belanja Langsung	280 538 529	422 898 835
2.1. Belanja Pegawai	26 213 960	37 675 445
2.2. Belanja Barang dan Jasa	98 595 534	145 395 229
2.3. Belanja Modal	155 729 035	239 828 161
B. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan	110 671 464	48 912 945
JUMLAH	807 540 861	870 889 047

Tabel 5. Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2016 – 2017 (ribu rupiah)

JENIS PENDAPATAN	2016	2017
(1)	(3)	(4)
A. Pendapatan Daerah	1 680 582 380	1 855 045 844
1. Pendapatan Asli Daerah	140 000 000	186 690 738
1.1. Pajak Daerah	35 622 956	45 234 040
1.2. Retribusi Daerah	25 749 930	11 120 953
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2 600 000	2 503 841
1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	76 027 114	127 831 904
2. Dana Perimbangan	1 273 251 635	1 400 150 085
2.1. Dana Bagi Hasil Pajak	64 947 827	163 741 270
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	90 628 244	-
2.3. Dana Alokasi Umum	749 202 532	866 617 294
2.4. Dana Alokasi Khusus	368 473 032	369 791 521
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	267 330 745	268 205 021
B. Pembiayaan Daerah	101 442 745	111 334 926
JUMLAH	1 782 025 125	1 966 380 770

Tabel 6. Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2016 – 2017 (ribu rupiah)

JENIS PENGELUARAN	2016	2017
(1)	(3)	(4)
A. Belanja Daerah	1 782 025 124	1 943 503 515
1. Belanja Tidak Langsung	1 014 348 066	979 477 935
1.1. Belanja Pegawai	727 135 932	618 976 924
1.2. Belanja Bunga	-	-
1.3. Belanja Subsidi	319 618	201 996
1.4. Belanja Hibah	5 183 000	12 245 147
1.5. Belanja Bantuan Sosial	-	782 500
1.6. Belanja Bagi Hasil	6 137 289	7 137 289
1.7. Belanja Bantuan Keuangan	274 072 227	339 134 079
1.8. Belanja Tidak Terduga	1 500 000	1 000 000
2. Belanja Langsung	767 677 058	964 025 580
2.1. Belanja Pegawai	40 074 395	55 319 900
2.2. Belanja Barang dan Jasa	358 896 666	417 602 246
2.3. Belanja Modal	368 705 997	491 103 434
B. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan	-	22 877 255
JUMLAH	1 782 025 125	1 966 380 770

Tabel 7. Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2016 – 2017 (ribu rupiah)

JENIS PENDAPATAN	2016	2017
(1)	(3)	(4)
A. Pendapatan Daerah	945 930 993	1 144 840 491
1. Pendapatan Asli Daerah / <i>Original</i>	72 794 497	190 571 540
1.1. Pajak Daerah	27 104 030	36 878 404
1.2. Retribusi Daerah	18 125 407	101 253 102
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1 992 751	1 746 736
1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	25 572 309	50 693 298
2. Dana Perimbangan	751 686 226	736 648 490
2.1. Dana Bagi Hasil Pajak	14 015 212	46 673 719
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	12 247 962	-
2.3. Dana Alokasi Umum	513 236 020	506 862 674
2.4. Dana Alokasi Khusus	212 187 032	183 112 097
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	121 450 271	217 620 461
B. Pembiayaan Daerah	(39 722 220)	(119 436 159)
JUMLAH	906 208 773	1 025 404 332

Tabel 8. Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2016 – 2017 (ribu rupiah)

JENIS PENGELUARAN	2016	2017
(1)	(3)	(4)
A. Belanja Daerah	876 746 067	1 021 213 635
1. Belanja Tidak Langsung	415 072 066	432 277 652
1.1. Belanja Pegawai	265 450 956	258 160 934
1.2. Belanja Bunga	2 885 200	1 590 726
1.3. Belanja Subsidi	-	1 811 975
1.4. Belanja Hibah	8 542 000	16 995 179
1.5. Belanja Bantuan Sosial	-	7 809 000
1.6. Belanja Bagi Hasil	-	-
1.7. Belanja Bantuan Keuangan	138 093 895	142 703 792
1.8. Belanja Tidak Terduga	100 015	3 206 046
2. Belanja Langsung	461 674 000	588 935 983
2.1. Belanja Pegawai	42 182 591	59 758 471
2.2. Belanja Barang dan Jasa	139 710 731	200 914 002
2.3. Belanja Modal	279 780 678	328 263 510
B. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan	29 462 707	4 190 697
JUMLAH	906 208 773	1 025 404 332

Tabel 9. Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2016 – 2017 (ribu rupiah)

JENIS PENDAPATAN	2016	2017
(1)	(3)	(4)
A. Pendapatan Daerah	1 288 335 520	1 287 408 975
1. Pendapatan Asli Daerah / <i>Original</i>	73 133 891	110 337 795
1.1. Pajak Daerah	12 327 335	14 823 015
1.2. Retribusi Daerah	7 333 944	7 436 637
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3 320 638	2 770 189
1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah/	50 151 974	85 307 954
2. Dana Perimbangan	1 032 812 399	1 020 817 735
2.1. Dana Bagi Hasil Pajak	22 409 921	21 122 603
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	-	-
2.3. Dana Alokasi Umum	725 610 454	719 435 512
2.4. Dana Alokasi Khusus	284 792 024	280 259 620
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	182 389 230	156 253 445
B. Pembiayaan Daerah	29 580 750	13 041 798
JUMLAH	1 317 916 270	1 300 450 773

Tabel 10. Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2016 – 2017 (ribu rupiah)

JENIS PENGELUARAN	2016	2017
(1)	(3)	(4)
A. Belanja Daerah	1 304 634 266	1 275 776 267
1. Belanja Tidak Langsung	726 978 981	713 188 617
1.1. Belanja Pegawai	562 677 543	507 092 660
1.2. Belanja Bunga	6 426	-
1.3. Belanja Subsidi	-	-
1.4. Belanja Hibah	10 666 799	7 694 330
1.5. Belanja Bantuan Sosial	67 750	4 066 243
1.6. Belanja Bagi Hasil	1 798 446	2 301 248
1.7. Belanja Bantuan Keuangan	151 528 495	192 001 498
1.8. Belanja Tidak Terduga	233 522	32 638
2. Belanja Langsung	577 655 285	562 587 650
2.1. Belanja Pegawai	30 291 945	39 504 708
2.2. Belanja Barang dan Jasa	314 095 795	261 222 678
2.3. Belanja Modal	233 267 545	261 860 264
B. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan	13 282 004	24 674 506
JUMLAH	1 317 916 270	1 300 450 773

Tabel 11. Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2016 – 2017 (ribu rupiah)

JENIS PENDAPATAN	2016	2017
(1)	(3)	(4)
A. Pendapatan Daerah	1 266 917 587	1 136 593 525
1. Pendapatan Asli Daerah / <i>Original</i>	70 901 946	113 730 072
1.1. Pajak Daerah	24 271 459	28 670 668
1.2. Retribusi Daerah	3 816 786	2 251 342
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3 353 914	2 645 844
1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	39 459 787	80 162 218
2. Dana Perimbangan	1 008 832 124	853 072 587
2.1. Dana Bagi Hasil Pajak	23 811 019	25 274 648
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	-	-
2.3. Dana Alokasi Umum	663 388 901	652 945 096
2.4. Dana Alokasi Khusus	321 632 204	174 852 843
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	187 183 517	169 790 866
B. Pembiayaan Daerah	37 808 950	20 147 256
JUMLAH	1 304 726 537	1 156 740 781

Tabel 12. Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2016 – 2017 (ribu rupiah)

JENIS PENGELUARAN	2016	2017
(1)	(3)	(4)
A. Belanja Daerah	1 280 219 697	1 152 060 267
1. Belanja Tidak Langsung	629 712 205	649 780 621
1.1. Belanja Pegawai	453 878 624	425 634 441
1.2. Belanja Bunga	-	-
1.3. Belanja Subsidi	-	-
1.4. Belanja Hibah	5 267 625	26 650 432
1.5. Belanja Bantuan Sosial	450 100	560 152
1.6. Belanja Bagi Hasil	3 028 225	622 607
1.7. Belanja Bantuan Keuangan	167 063 856	193 971 318
1.8. Belanja Tidak Terduga	23 775	2 341 671
2. Belanja Langsung	650 507 492	502 279 647
2.1. Belanja Pegawai	52 649 541	72 079 470
2.2. Belanja Barang dan Jasa	238 837 403	263 535 876
2.3. Belanja Modal	359 020 548	166 664 300
B. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan	24 506 840	4 079 513
JUMLAH	1 304 726 537	1 156 139 780

Tabel 13. Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Toli-toli, Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2016 – 2017 (ribu rupiah)

JENIS PENDAPATAN	2016	2017
(1)	(3)	(4)
A. Pendapatan Daerah	924 983 000	1 107 426 358
1. Pendapatan Asli Daerah	63 623 624	100 514 206
1.1. Pajak Daerah	9 610 146	12 659 752
1.2. Retribusi Daerah	3 777 065	4 028 450
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2 876 687	2 560 623
1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah/	47 359 726	81 265 381
2. Dana Perimbangan	761 289 991	881 358 339
2.1. Dana Bagi Hasil Pajak	21 332 989	20 931 342
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	-	-
2.3. Dana Alokasi Umum	617 939 400	612 841 706
2.4. Dana Alokasi Khusus	122 017 962	247 585 291
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	100 069 385	125 553 813
B. Pembiayaan Daerah	29 993 657	3 229 075
JUMLAH	954 976 657	1 110 655 433

Tabel 14. Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Toli-toli, Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2016 – 2017 (ribu rupiah)

JENIS PENGELUARAN	2016	2017
(1)	(3)	(4)
A. Belanja Daerah	946 614 743	1 100 849 886
1. Belanja Tidak Langsung	535 462 944	578 210 679
1.1. Belanja Pegawai	404 768 710	408 842 146
1.2. Belanja Bunga	-	-
1.3. Belanja Subsidi	1 433 337	-
1.4. Belanja Hibah	6 745 546	8 088 912
1.5. Belanja Bantuan Sosial	406 000	453 900
1.6. Belanja Bagi Hasil	-	-
1.7. Belanja Bantuan Keuangan	120 103 153	158 967 551
1.8. Belanja Tidak Terduga	2 006 198	1 858 170
2. Belanja Langsung	411 151 799	522 639 207
2.1. Belanja Pegawai	45 442 759	41 930 679
2.2. Belanja Barang dan Jasa	211 936 804	214 737 916
2.3. Belanja Modal	153 772 236	265 970 611
B. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan	8 361 914	9 805 547
JUMLAH	954 976 657	1 110 655 433

Tabel 15. Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2016 – 2017 (ribu rupiah)

JENIS PENDAPATAN	2016	2017
(1)	(3)	(4)
A. Pendapatan Daerah	902 028 568	938 746 233
1. Pendapatan Asli Daerah / <i>Original</i>	53 259 653	76 219 455
1.1. Pajak Daerah	6 896 352	6 514 457
1.2. Retribusi Daerah	2 557 193	2 546 908
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2 221 364	1 929 178
1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah/	41 584 744	65 228 911
2. Dana Perimbangan	713 728 167	739 093 441
2.1. Dana Bagi Hasil Pajak	21 205 799	21 038 268
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	-	-
2.3. Dana Alokasi Umum	531 825 933	527 418 461
2.4. Dana Alokasi Khusus	160 696 435	190 636 713
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	135 040 748	123 433 337
B. Pembiayaan Daerah	69 153 202	12 266 808
JUMLAH	971 181 770	951 013 041

Tabel 16. Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2016 – 2017 (ribu rupiah)

JENIS PENGELUARAN	2016	2017
(1)	(3)	(4)
A. Belanja Daerah	953 368 636	935 356 140
1. Belanja Tidak Langsung	479 219 768	459 143 803
1.1. Belanja Pegawai	320 239 997	292 594 417
1.2. Belanja Bunga	-	-
1.3. Belanja Subsidi	-	-
1.4. Belanja Hibah	28 348 294	14 424 734
1.5. Belanja Bantuan Sosial	7 344 806	8 439 738
1.6. Belanja Bagi Hasil	117 815	935 453
1.7. Belanja Bantuan Keuangan	123 059 864	141 859 165
1.8. Belanja Tidak Terduga	108 992	890 296
2. Belanja Langsung	474 148 868	476 212 337
2.1. Belanja Pegawai	48 730 484	54 598 521
2.2. Belanja Barang dan Jasa	175 387 190	184 686 231
2.3. Belanja Modal	250 031 194	236 927 585
B. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan	17 813 133	15 656 901
JUMLAH	971 181 770	951 013 041

Tabel 17. Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2016 – 2017 (ribu rupiah)

JENIS PENDAPATAN	2016	2017
(1)	(3)	(4)
A. Pendapatan Daerah	1 469 285 281	1 449 457 798
1. Pendapatan Asli Daerah / <i>Original</i>	107 561 813	153 873 011
1.1. Pajak Daerah	13 983 719	15 740 486
1.2. Retribusi Daerah	6 505 255	7 609 114
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1 801 019	1 322 911
1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah/	85 271 820	129 200 500
2. Dana Perimbangan	1 122 622 396	1 030 951 164
2.1. Dana Bagi Hasil Pajak	15 478 043	21 909 233
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	-	11 555 231
2.3. Dana Alokasi Umum	746 942 048	740 305 507
2.4. Dana Alokasi Khusus	360 202 304	268 736 424
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	239 101 072	264 633 623
B. Pembiayaan Daerah	54 782 389	53 304 244
JUMLAH	1 524 067 670	1 502 762 042

Tabel 18. Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2016 – 2017 (ribu rupiah)

JENIS PENGELUARAN	2016	2017
(1)	(3)	(4)
A. Belanja Daerah	1 461 272 505	1 439 423 291
1. Belanja Tidak Langsung	768 145 513	824 627 298
1.1. Belanja Pegawai	507 807 939	488 194 316
1.2. Belanja Bunga	1 037 760	902 506
1.3. Belanja Subsidi	-	-
1.4. Belanja Hibah	12 357 199	27 960 316
1.5. Belanja Bantuan Sosial	522 000	9 841 430
1.6. Belanja Bagi Hasil	1 219 813	1 798 272
1.7. Belanja Bantuan Keuangan	244 530 788	295 389 146
1.8. Belanja Tidak Terduga	670 014	541 312
2. Belanja Langsung	693 126 991	614 795 993
2.1. Belanja Pegawai	53 674 647	71 399 223
2.2. Belanja Barang dan Jasa	277 599 331	309 915 599
2.3. Belanja Modal	361 853 013	233 481 171
B. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan	62 795 166	63 338 751
JUMLAH	1 524 067 670	1 502 762 042

Tabel 19. Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2016 – 2017 (ribu rupiah)

JENIS PENDAPATAN	2016	2017
(1)	(3)	(4)
A. Pendapatan Daerah	1 062 566 334	961 582 935
1. Pendapatan Asli Daerah	48 453 761	75 671 645
1.1. Pajak Daerah	8 731 832	10 131 458
1.2. Retribusi Daerah	24 538 113	1 488 387
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2 508 021	2 190 304
1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah/	12 675 795	61 861 496
2. Dana Perimbangan	899 335 870	750 356 886
2.1. Dana Bagi Hasil Pajak	22 430 353	24 935 336
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	-	-
2.3. Dana Alokasi Umum	555 023 062	551 607 986
2.4. Dana Alokasi Khusus	321 882 455	173 813 564
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	114 776 703	135 554 404
B. Pembiayaan Daerah	50 844 488	53 579 690
JUMLAH	1 113 410 822	1 015 162 625

Tabel 20. Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2016 – 2017 (ribu rupiah)

JENIS PENGELUARAN	2016	2017
(1)	(3)	(4)
A. Belanja Daerah	1 059 836 754	975 362 670
1. Belanja Tidak Langsung	445 012 308	461 957 389
1.1. Belanja Pegawai	290 397 334	282 654 017
1.2. Belanja Bunga	-	-
1.3. Belanja Subsidi	427 969	296 238
1.4. Belanja Hibah	9 035 485	8 055 189
1.5. Belanja Bantuan Sosial	-	6 038 000
1.6. Belanja Bagi Hasil	3 062 814	763 232
1.7. Belanja Bantuan Keuangan	141 507 236	164 082 871
1.8. Belanja Tidak Terduga	581 471	67 842
2. Belanja Langsung	614 824 447	513 405 281
2.1. Belanja Pegawai	66 766 780	77 055 296
2.2. Belanja Barang dan Jasa	232 527 386	223 420 291
2.3. Belanja Modal	315 530 280	212 929 694
B. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan	53 574 068	39 799 955
JUMLAH	1 113 410 822	1 015 162 625

Tabel 21. Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2016 – 2017 (ribu rupiah)

JENIS PENDAPATAN	2016	2017
(1)	(3)	(4)
A. Pendapatan Daerah	1 212 221 064	1 097 233 336
1. Pendapatan Asli Daerah	32 701 049	76 602 666
1.1. Pajak Daerah	8 066 430	10 723 408
1.2. Retribusi Daerah	2 085 852	2 574 733
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	785 216	811 958
1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	21 763 551	62 492 567
2. Dana Perimbangan	972 267 256	844 248 207
2.1. Dana Bagi Hasil Pajak	12 431 589	19 101 618
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	5 151 189	-
2.3. Dana Alokasi Umum	641 173 386	629 910 031
2.4. Dana Alokasi Khusus	313 511 092	195 236 558
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	207 252 759	176 382 463
B. Pembiayaan Daerah	22 295 200	20 216 671
JUMLAH	1 234 516 264	1 117 450 007

Tabel 22. Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2016 – 2017 (ribu rupiah)

JENIS PENGELUARAN	2016	2017
(1)	(3)	(4)
A. Belanja Daerah	1 213 399 488	1 084 234 206
1. Belanja Tidak Langsung	610 550 858	612 242 995
1.1. Belanja Pegawai	431 352 678	401 595 033
1.2. Belanja Bunga	-	-
1.3. Belanja Subsidi	-	-
1.4. Belanja Hibah	4 693 586	6 445 040
1.5. Belanja Bantuan Sosial	458 565	1 605 000
1.6. Belanja Bagi Hasil	-	794 025
1.7. Belanja Bantuan Keuangan	174 046 029	201 753 036
1.8. Belanja Tidak Terduga	-	50 861
2. Belanja Langsung	602 848 630	471 991 211
2.1. Belanja Pegawai	47 731 590	6 520 053
2.2. Belanja Barang dan Jasa	224 689 619	260 643 117
2.3. Belanja Modal	330 427 421	204 828 041
B. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan	21 116 776	33 215 801
JUMLAH	1 234 516 264	1 117 450 007

Tabel 23. Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2016 – 2017 (ribu rupiah)

JENIS PENDAPATAN	2016	2017
(1)	(3)	(4)
A. Pendapatan Daerah	549 813 147	619 309 794
1. Pendapatan Asli Daerah	19 814 500	30 317 152
1.1. Pajak Daerah	3 715 493	5 148 124
1.2. Retribusi Daerah	6 104 289	6 651 958
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-
1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah/	9 994 718	18 517 070
2. Dana Perimbangan	453 010 035	526 435 473
2.1. Dana Bagi Hasil Pajak	13 200 031	19 100 292
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	-	-
2.3. Dana Alokasi Umum	363 653 690	362 972 147
2.4. Dana Alokasi Khusus	76 156 314	144 363 034
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	76 988 612	62 557 169
B. Pembiayaan Daerah	48 747 378	72 606 119
JUMLAH	598 560 525	691 915 913

Tabel 24. Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2016 – 2017 (ribu rupiah)

JENIS PENGELUARAN	2016	2017
(1)	(3)	(4)
A. Belanja Daerah	523 149 371	583 627 646
1. Belanja Tidak Langsung	190 587 748	228 838 571
1.1. Belanja Pegawai	119 830 086	115 250 649
1.2. Belanja Bunga	-	-
1.3. Belanja Subsidi	-	-
1.4. Belanja Hibah	4 769 300	6 092 710
1.5. Belanja Bantuan Sosial	-	-
1.6. Belanja Bagi Hasil	-	901 129
1.7. Belanja Bantuan Keuangan	65 988 362	106 594 083
1.8. Belanja Tidak Terduga	-	-
2. Belanja Langsung	332 561 623	354 789 075
2.1. Belanja Pegawai	30 867 145	43 667 176
2.2. Belanja Barang dan Jasa	112 449 756	114 084 814
2.3. Belanja Modal	189 244 722	197 037 085
B. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan	75 411 154	108 288 267
JUMLAH	598 560 525	691 915 913

Tabel 25. Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2016 – 2017 (ribu rupiah)

JENIS PENDAPATAN	2016	2017
(1)	(3)	(4)
A. Pendapatan Daerah	869 147 173	889 947 144
1. Pendapatan Asli Daerah	37 206 045	54 607 359
1.1. Pajak Daerah	9 565 923	9 637 182
1.2. Retribusi Daerah	15 406 009	15 607 728
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	566 005
1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah/	12 234 112	28 796 444
2. Dana Perimbangan	736 790 834	709 105 747
2.1. Dana Bagi Hasil Pajak	30 320 568	38 132 593
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	-	-
2.3. Dana Alokasi Umum	548 263 034	547 360 397
2.4. Dana Alokasi Khusus	158 207 232	123 612 757
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	95 150 295	126 234 038
B. Pembiayaan Daerah	45 007 517	61 934 967
JUMLAH	914 154 690	951 882 111

Tabel 26. Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2016 – 2017 (ribu rupiah)

JENIS PENGELUARAN	2016	2017
(1)	(3)	(4)
A. Belanja Daerah	846 561 508	937 077 582
1. Belanja Tidak Langsung	384 376 651	429 003 624
1.1. Belanja Pegawai	243 756 288	265 959 120
1.2. Belanja Bunga	-	-
1.3. Belanja Subsidi	-	-
1.4. Belanja Hibah	1 538 500	2 263 350
1.5. Belanja Bantuan Sosial	320 000	77 000
1.6. Belanja Bagi Hasil	1 478 983	270 440
1.7. Belanja Bantuan Keuangan	134 829 352	158 841 487
1.8. Belanja Tidak Terduga	2 453 528	1 592 227
2. Belanja Langsung	462 184 857	508 073 957
2.1. Belanja Pegawai	34 789 971	47 008 044
2.2. Belanja Barang dan Jasa	154 068 323	217 593 192
2.3. Belanja Modal	273 326 563	243 472 721
B. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan	67 593 182	14 804 529
JUMLAH	914 154 690	951 882 111

Tabel 27. Realisasi Penerimaan Pemerintah Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2016 – 2017 (ribu rupiah)

JENIS PENDAPATAN	2016	2017
(1)	(3)	(4)
A. Pendapatan Daerah	1 392 211 749	1 340 647 283
1. Pendapatan Asli Daerah	279 582 787	284 380 010
1.1. Pajak Daerah	102 894 772	114 598 205
1.2. Retribusi Daerah	15 595 658	14 316 839
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4 014 389	2 536 110
1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah/	157 077 969	152 928 856
2. Dana Perimbangan	1 035 430 761	928 017 146
2.1. Dana Bagi Hasil Pajak	30 717 835	33 148 909
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	-	-
2.3. Dana Alokasi Umum	683 609 353	671 600 535
2.4. Dana Alokasi Khusus	321 103 573	223 267 702
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	77 198 201	128 250 126
B. Pembiayaan Daerah	21 410 435	1 578 996
JUMLAH	1 413 622 184	1 342 226 279

Tabel 28. Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2016 – 2017 (ribu rupiah)

JENIS PENGELUARAN	2016	2017
(1)	(3)	(4)
A. Belanja Daerah	1 381 081 486	1 245 186 846
1. Belanja Tidak Langsung	671 875 435	535 864 560
1.1. Belanja Pegawai	651 060 039	522 743 975
1.2. Belanja Bunga	4 973 544	2 854 856
1.3. Belanja Subsidi	-	-
1.4. Belanja Hibah	6 793 975	5 580 835
1.5. Belanja Bantuan Sosial	7 717 185	4 062 756
1.6. Belanja Bagi Hasil	-	-
1.7. Belanja Bantuan Keuangan	612 431	619 470
1.8. Belanja Tidak Terduga	718 260	2 668
2. Belanja Langsung	709 206 051	709 322 285
2.1. Belanja Pegawai	85 454 925	56 910 254
2.2. Belanja Barang dan Jasa	336 614 097	401 311 517
2.3. Belanja Modal	287 137 029	251 100 514
B. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan	32 540 699	97 039 433
JUMLAH	1 413 622 184	1 342 226 279

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

<https://sulteng.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Jl. Prof. Moh. Yamin, SH. No. 48 Palu 94114 Telp. (0451) 483610, 483611, Fax (0451) 483612
Website: <http://sulteng.bps.go.id>; Email: bps7200@bps.go.id

ISSN 2354-7456



9 772354 745685